

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Andi Toappo Sawa Rifqi Hasan
NPP. 32.0881

Asdaf Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: 32.0881@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Serly Wulandari, S.IP, M.Tr.I.P.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Waste management is one of the crucial issues faced by the Makassar City Government. Although various policies have been implemented, the high volume of waste is still a big challenge, especially in terms of the effectiveness of governance and the involvement of all stakeholders. Starting from this problem, the concept of Collaborative Governance is needed to overcome this problem. **Purpose:** This study aims to determine and analyze the application of collaborative governance in waste management by the Makassar City Environmental Service. **Method:** This research uses a Descriptive Qualitative approach. This approach was chosen because it has relevance to the description of a topic in detail and rooted so that the research objectives can be achieved properly. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The main theory used to analyze this topic is Ansell and Gash's (2008) collaborative governance theory. There were 11 informants involved in this research. Data analysis was conducted through data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The instrument of this research is the author himself. **Result:** This research produces field findings that are analyzed through the dimensions of the collaborative governance theory, in the dimension of the initial conditions of waste management in Makassar City, it has been running but not optimal, in the dimension of the Collaborative Process it has been running because there are four successful indicators. However, the indicator of building trust is considered unsuccessful, in the Institutional Design dimension it has been successful because there is a communication forum, clear basic rules and transparency of the process, in the Facilitative Leadership dimension in collaborative governance of waste management in Makassar City has been running optimally. **Conclusion:** In general, collaborative governance in waste management by the Makassar City Environmental Service has been running but not optimal.

Keywords: Collaborative Governance, Waste Management, Makassar City, Environment Agency

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Makassar. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, volume sampah yang tinggi masih menjadi tantangan besar, terutama dalam hal efektivitas tata kelola dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Berawal dari permasalahan tersebut konsep *Collaborative Governance* diperlukan untuk mengatasi masalah ini. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Pendekatan ini

dipilih karena memiliki relevansi dengan penjabaran suatu topik secara terperinci dan mengakur sehingga tujuan penelitian mampu dicapai dengan baik. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori utama yang dipakai untuk menganalisis topik ini adalah teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008). Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 11 informan. Analisis data dilaksanakan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri. **Hasil/Temuan:** Penelitian ini menghasilkan temuan lapangan yang dianalisis melalui dimensi pada teori *collaborative governance*, pada dimensi kondisi awal pengelolaan sampah di Kota Makassar sudah berjalan namun belum optimal, pada dimensi Proses Kolaboratif sudah berjalan karena terdapat empat indikator yang berhasil. Namun, indikator membangun kepercayaan dianggap tidak berhasil, pada dimensi Desain Kelembagaan (Institutional Design) sudah berhasil karena telah tersedia forum komunikasi, peraturan dasar yang jelas serta transparansi proses, pada dimensi Kepemimpinan Fasilitatif dalam *collaborative governance* pengelolaan sampah di Kota Makassar sudah berjalan dengan optimal **Kesimpulan:** Secara umum *Collaborative governance* Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sudah berjalan namun belum optimal.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Pengelolaan Sampah, Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi yang terus meningkat, melawan tantangan serius terkait masalah pengelolaan sampah (Rucevska et al., 2024). Masalah ini menjadi besar, seiring dengan perkembangan ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat, yang menghasilkan sangat banyak limbah. Limbah yang dihasilkan juga ada berbagai macam yaitu limbah padat dan limbah cair. Untuk itu, langkah pertama yang harus dilakukan ialah mengenali berbagai macam sampah yang ada di lingkungan, kemudian mengelompokkan mana yang bisa digunakan mana yang habis pakai dan mana yang masih bisa didaur ulang karena didalam sampah memiliki banyak kegunaan (Nugraha et al., 2024). Masyarakat di Indonesia pada dasarnya masih berasumsi bahwa limbah ialah sampah yang tidak berguna lagi dan harus dibuang maupun dibakar, tetapi jika limbah tersebut ditimbun maka akan terjadi penumpukan sampah. Dan sepatutnya limbah tersebut dapat dibuang karena banyak juga limbah dapat dikelola menjadi produk yang berguna (Aragaw, 2025).

Permasalahan sampah di Indonesia salah satunya dialami oleh provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia (Suryanto et al., 2023). Dimana provinsi Sulawesi Selatan seiring perkembangan populasi dan urbanisasi yang pesat, volume sampah yang di hasilkan semakin meningkat. Provinsi Sulawesi Selatan juga termasuk dalam daftar 10 besar timbulan/volume sampah terbanyak di Indonesia, dapat diketahui bahwa provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan peringkat ke-7 dari 38 provinsi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya masalah sampah yang perlu di tangani di provinsi Sulawesi Selatan. Permasalahan timbulan sampah di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi masalah lingkungan yang semakin serius khususnya di Kota Makassar. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Makassar menempati peringkat pertama dalam timbulan sampah. Selama 3 tahun terakhir, mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2021 ke 2022 terjadi penurunan tetapi tahun 2023 mengalami peningkatan kembali yang tercantum pada data Pengelolaan Sampah di Indonesia dari Sistem Informasi Pengelolaan sampah Nasional (SIPSN).

Tabel 1

NO	PROVINSI	TIMBULAN SAMPAH TAHUNAN (TON)		
		2021	2022	2023
1	ACEH	196,604.37	598,630.37	920,435.58
2	SUMATERA UTARA	2,092,364.46	2,062,420.30	1,827,494.37
3	SUMATERA BARAT	425,490.74	958,235.30	866,161.91
4	RIAU	650,029.09	856,366.46	976,691.24
5	JAMBI	287,374.47	352,484.44	291,863.28
6	SUMATERA SELATAN	856,484.08	1,253,536.88	534,017.07
7	BENGKULU	38,966.12	137,034.72	329,616.33
8	LAMPUNG	500,345.08	629,905.58	1,250,811.78
9	BABEL	191,441.88	154,292.07	188,310.07
10	KEPULAUAN RIAU	141,982.73	586,454.74	583,365.71
11	DKI JAKARTA	2,354,345.24	3,112,381.41	3,141,650.18
12	JAWA BARAT	4,510,863.43	5,351,017.02	4,279,095.53
13	JAWA TENGAH	5,021,888.22	5,904,061.08	5,372,159.80
14	DI YOGYAKARTA	452,637.63	691,435.18	549,971.86
15	JAWA TIMUR	4,068,912.00	5,616,863.25	6,117,220.19
16	BANTEN	795,829.76	2,627,865.54	2,037,973.03
17	BALI	915,482.47	1,027,433.75	1,229,234.65
18	NTB	367,512.99	814,803.96	194,405.46
19	NTT	153,332.48	162,984.51	533,205.12
20	KALIMANTAN BARAT	437,814.00	574,099.34	1,070,672.42
21	KALIMANTAN TENGAH	260,338.52	358,359.00	482,168.88
22	KALIMANTAN SELATAN	782,592.39	776,827.15	704,926.22
23	KALIMANTAN TIMUR	666,303.38	791,828.97	809,331.65
24	KALIMANTAN UTARA	20,093.14	44,338.49	63,812.26
25	SULAWESI UTARA	312,875.19	485,946.26	492,706.85
26	SULAWESI TENGAH	254,913.08	405,093.08	384,943.78
27	SULAWESI SELATAN	1,216,987.46	1,317,276.45	1,582,378.10
28	GORONTALO	51,541.50	149,170.71	152,050.94
29	SULAWESI TENGGARA	125,445.34	264,182.13	437,958.46
30	SULAWESI BARAT	48,327.90	45,956.42	46,343.03
31	MALUKU	93,074.44	73,365.88	216,767.00

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2024

Pertumbuhan penduduk di Kota Makassar yang terdapat di tabel menunjukkan dari tahun 2021 selalu mengalami peningkatan. Permasalahan sampah yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk di Kota Makassar, tentu saja perlu di atasi mengingat dahulunya Kota Makassar pernah meraih penghargaan Adipura pada tahun 2017 dan 2019. Lebih lanjut, permasalahan sampah di Kota Makassar ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Pada PERDA Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah menjelaskan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Makassar. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Dengan adanya Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara berkelanjutan, sertamasyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup sangat krusial dalam menghadapi tantangan-tantangan lingkungan seperti pencemaran, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem. Secara keseluruhan, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi Masyarakat dan berdasarkan pada konsep kolaborasi antar aktor (Rochmansjah, 2018)

Pengelolaan sampah berbasis kolaborasi akan menggunakan seluruh *stakeholders* bertanggung jawab secara kolektif untuk mengatasi permasalahan sampah. Proses kolaborasi yang baik bergantung kepada pembagian informasi (Deneen, 2010). Hal yang terbaru mengenai timbulan sampah, tingkat daur ulang, dan dampak lingkungan juga tidak kalah penting untuk pengambilan keputusan yang baik. Rangka tata kelola kolaboratif memiliki proses untuk menyelesaikan masalah yang mungkin muncul antara pemangku kepentingan dengan kepentingan dan prioritas pengelolaan sampah yang tidak sama. Aktivis dari Yayasan

Konservasi Laut (YKL) Indonesia, menilai fenomena masalah sampah yang terjadi di Kota Makassar terdapat pada tata kelola dan koordinasi berbagai pihak dalam pengelolaan sampah dinilai masih kurang.

Salah satu bentuk kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar yaitu Bank Sampah dengan Lembaga Swasta berupa kerjasama dalam penanganan dan pengurangan sampah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Bank Sampah Unit (BSU) dan beberapa pihak swasta atau vendor. Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah sebagai pembuat kebijakan dituntut dapat memfasilitasi pihak-pihak yang bekerja sama, tetapi pada perwujudannya kolaborasi antara pihak LSM masih kurang optimal. Dengan kata lain kolaborasi yang dilakukan antara *stakeholders* terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah berakibat buruk karena belum adanya kepercayaan antara aktor dan pemahaman bersama.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Efektivitas komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam collaborative governance pengelolaan sampah di Kota Makassar. Meskipun collaborative governance telah diterapkan, masih terdapat kemungkinan adanya kesenjangan dalam komunikasi dan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kota, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum sebagai proses pemecahan masalah atau *problem solving* (C. K. Ansell, 2016). Penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana informasi dibagikan, keputusan dibuat, dan tindakan dikoordinasikan di antara berbagai pihak yang terlibat. Analisis mendalam tentang pola komunikasi, frekuensi pertemuan, dan mekanisme pengambilan keputusan bersama dapat mengungkapkan area-area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar.

Tantangan dalam mengintegrasikan inovasi teknologi dan praktik tradisional dalam pengelolaan sampah kolaboratif di Kota Makassar. Seiring dengan perkembangan teknologi pengelolaan sampah, terdapat kebutuhan untuk mengintegrasikan solusi inovatif dengan praktik pengelolaan sampah yang sudah ada dan mungkin telah mengakar dalam masyarakat. Penelitian dapat menyelidiki bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dan mitra kolaboratifnya mengatasi resistensi terhadap perubahan, menjembatani kesenjangan pengetahuan, dan memastikan adopsi teknologi baru tanpa menghilangkan nilai-nilai dan praktik lokal yang positif. Analisis ini dapat mencakup studi kasus tentang implementasi teknologi baru, seperti sistem pemilahan sampah otomatis atau aplikasi berbasis smartphone untuk pelaporan dan pengelolaan sampah, serta bagaimana hal ini diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada.

Keberlanjutan finansial dan model bisnis dalam collaborative governance pengelolaan sampah di Kota Makassar. Meskipun collaborative governance dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah, tantangan finansial tetap menjadi isu kritis. Penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana berbagai pemangku kepentingan dalam kolaborasi ini mengembangkan dan mengelola model bisnis yang berkelanjutan untuk mendukung inisiatif pengelolaan sampah jangka panjang. Ini dapat mencakup analisis tentang pembagian biaya dan manfaat di antara mitra, inovasi dalam pendanaan (seperti kemitraan publik-swasta atau skema insentif ekonomi), serta strategi untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah. Selain itu, penelitian dapat menyelidiki potensi ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah dan bagaimana hal ini dapat diintegrasikan ke dalam model collaborative governance yang ada untuk meningkatkan keberlanjutan finansial dan lingkungan (Kereh et al., 2024).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan karena adanya celah di beberapa penelitian terdahulu yang bisa diisi dan diteliti lebih lanjut, seperti halnya dengan penelitian karya Jumaah dkk tahun 2022 berjudul *Collaborative Governance Berbasis Pendekatan Penta Helix Stakeholder Dalam*

Mengatasi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Lombok Timur, dengan hasil pendekatan Collaborative Governance berbasis Pendekatan Penta Helix dapat menjadi solusi yang efektif untuk menangani pandemi Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur (Jumaah et al., 2022).

Penelitian karya Rinaldoa dan Rahayu tahun 2019 berjudul Penanganan Sampah Secara Kolaboratif Antara Masyarakat Dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan (Kasus Penanganan Sampah di Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat), dengan hasil penelitian peran bersama antara masyarakat dan petugas dalam penanganan sampah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat (Rinaldoa & Rahayu, 2019).

Penelitian karya Rosyadi dan Listyaningrum tahun 2013 berjudul Permodelan Sampah Permukiman Berbasis Manajemen kolaborasi (Studi Kasus di Desa Palimanan Barat Kabupaten Cirebon), dengan hasil menyatakan bahwa pengelolaan sampah permukiman di Desa Palimanan Barat, Kota Cirebon membutuhkan pendekatan yang lebih terintegritas dan berbasis kolaborasi antara masyarakat, pemerintahan desa dan pihak terkait lainnya (Rosyadi & Lestianingrum, 2013).

Penelitian karya Berliandaldo tahun 2021 berjudul Kolaborasi Dan Sinergitas Antara *Stakeholder* dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong, dengan hasil bahwa kolaborasi dan sinergitas antara berbagai stakeholder (pemerintah, industri pariwisata, masyarakat lokal, akademisi, dan media) sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata di Kebun Raya Cibinon, Kabupaten Bogor (Berliandaldo et al., 2021).

Penelitian karya Angel dan Nasution tahun 2023 berjudul Kolaborasi Pemerintah Dengan *Stakeholders* Dalam Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Belawan Sicanang Kota Medan dengan hasil bahwa kolaborasi antara pemerintah dan berbagai stakeholders (seperti masyarakat, sektor swasta, LSM, dan akademisi) sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Belawan Sicanang (Angel & Nasution, 2023).

14 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam kajian pengentasan masalah sampah, kebaruan ini terletak pada pendekatan holistik dan kontekstual dalam menganalisis dinamika collaborative governance di tingkat lokal, khususnya dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Makassar. Melalui metode kualitatif yang mendalam, penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi mekanisme formal collaborative governance, tetapi juga menggali nuansa sosio-kultural yang memengaruhi interaksi antar pemangku kepentingan dalam konteks Sulawesi Selatan. Studi ini menawarkan perspektif baru dengan mengintegrasikan analisis jaringan sosial, teori kelembagaan, dan pendekatan etnografis untuk memahami bagaimana nilai-nilai lokal, struktur kekuasaan informal, dan praktik budaya berbaur dengan kebijakan formal dalam membentuk collaborative governance. Lebih jauh, penelitian ini mengungkap kompleksitas adaptasi model collaborative governance dalam konteks perkotaan yang berkembang pesat seperti Makassar, memberikan wawasan berharga tentang bagaimana inovasi kebijakan dapat diselaraskan dengan realitas sosial dan lingkungan setempat. Dengan demikian, studi ini tidak hanya berkontribusi pada literatur collaborative governance dan manajemen perkotaan, tetapi juga menyediakan kerangka analitis baru untuk memahami dan meningkatkan efektivitas kerjasama multi-stakeholder dalam pengelolaan lingkungan di kota-kota berkembang di Indonesia. Arah ini tentu berbeda dengan penelitian terdahulu yang mayoritas masih mengandalkan satu dinas dalam penanganan sampah tanpa ada unsur kolaborasi, seperti pada penelitian (Kurniawan & Santoso, 2020) dan juga pada penelitian

(Mokodompis et al., 2019)

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis collaborative governance dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis collaborative governance dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan ini dipilih karena memiliki relevansi dengan penjabaran suatu topik secara terperinci dan mengakar sehingga tujuan penelitian mampu dicapai dengan baik (Sugiyono, 2023). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori *Collaborative Governance* oleh (C. Ansell & Gash, 2008). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, studi dokumen dan juga wawancara kepada informan yang telah ditentukan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive* dan *snowball sampling*, dan diambil berdasarkan keterlibatannya pada penanganan sampah dan juga dalam keterlibatannya pada proses kolaborasi, baik internal maupun eksternal. Adapun informan yang dipakai sejumlah 11 informan. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, dalam hal ini informan kunci dipilih berdasarkan anggapan penulis bahwa subjek tersebut memiliki pengetahuan yang mendalam dan radikal pada sebuah topik yang dibahas (Simangunsong, 2017). Teknik analisis data pada penelitian ini dilangsungkan melalui 3 tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan di bulan Januari tahun 2025, Adapun lokus penelitian ini adalah di Lingkup Kota Makassar terkhusus pada internal Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Lokasi bank sampah di Kota Makassar.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis penyelesaian masalah sampah di Kota Makassar menggunakan konsep collaborative governance oleh Ansell dan Gash (2008) dengan dimensi antara lain Kondisi awal, Desain Institusional, Kepemimpinan fasilitatif, dan juga Proses kolaborasi, kemudian dijabarkan berdasarkan temuan penelitian sebagai berikut :

3.1 Kondisi Awal

Pada Kondisi awal ini diturunkan menjadi tiga indikator besar yaitu, sumber daya dan pengetahuan, insentif dan konflik. Pada indikator pertama terkait dengan sumber daya dan pengetahuan diketahui bahwa terjadinya collaborative governance diawali dengan adanya Sumber daya dan pengetahuan. Pengelolaan Sampah, dalam hal ini berfokus pada Kota Makassar merupakan proses pengelolaan sampah yang berasal dari sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor dalam pengelolaan sampah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kolaborasi. Hal ini menunjukkan adanya sumber daya dan pengetahuan sehingga perlu memperhatikan dua aspek yang penting untuk memastikan keberhasilan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Berdasarkan pernyataan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Camat Manggala dapat diketahui bahwa pengelolaan sampah di Kota Makassar menghadapi tantangan yang besar. Dimana Kota Makassar hanya memiliki satu TPA yang

bernama TPA Tamangapa. Meskipun TPA Tamangapa memiliki kapasitas yang besar kapasitasnya mulai terbebani dengan meningkatnya volume sampah setiap tahun yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat. Kota Makassar terus mengedukasi masyarakat melalui program kampanye media untuk meningkatkan kesadaran.

Kota Makassar terus berkomitmen dalam mengedukasi masyarakat melalui berbagai program kampanye media untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Melalui peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025, kegiatan seperti aksi bersih-bersih, penyuluhan pemilahan sampah organik dan non-organik, hingga apresiasi terhadap pegiat kebersihan menjadi wujud nyata dari upaya kolaboratif menuju lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Indikator sumber daya dan pengetahuan menunjukkan bahwa keberhasilan collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas, pengetahuan, dan keterlibatan aktif masyarakat. Meskipun telah memiliki TPA Tamangapa dan program edukasi berkelanjutan, peningkatan volume sampah serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, penguatan edukasi melalui kampanye media dan kolaborasi antaraktor menjadi kunci dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Indikator kedua terkait dengan insentif menunjukkan bahwa Insentif yang diberikan kepada pemangku kepentingan untuk berkolaborasi merujuk pada manfaat atau keuntungan yang diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Tujuan utama dari pemberian insentif ini adalah untuk mendorong partisipasi yang lebih aktif, kontribusi yang nyata, dan komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat. Dengan adanya insentif, diharapkan para pemangku kepentingan merasa termotivasi untuk bekerja sama secara lebih intensif dan berkontribusi lebih besar dalam mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa Pemberian insentif dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar dilakukan secara selektif dan tahunan untuk memastikan hanya pihak yang benar-benar berkontribusi maksimal yang mendapat penghargaan. Insentif diberikan kepada berbagai kategori, seperti BSU terbaik, pelaku usaha yang berhasil mengolah sampah, hingga penyapu jalan dan motivator lingkungan, dengan masing-masing penerima mendapatkan 5 juta rupiah. Insentif ini bertujuan untuk memotivasi lebih banyak pihak agar aktif dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sekaligus menghargai mereka yang telah bekerja dengan baik dalam menjaga kebersihan kota. Ke depannya, acara seperti Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) ini akan terus dilaksanakan, diharapkan dapat mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Indikator ketiga terkait dengan konflik, adanya konflik antara pemangku kepentingan memang memegang peranan penting sebagai salah satu indikator penentu keberhasilan suatu kolaborasi. Pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga lainnya, memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda. Ketegangan ini seringkali muncul akibat perbedaan prioritas, sumber daya yang terbatas, atau riwayat hubungan yang kurang baik antara pihak-pihak tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari informan, pengelolaan sampah yang melibatkan berbagai pihak di Kota Makassar menghadapi beberapa konflik, terutama terkait dengan tanggung jawab antar wilayah, kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dan adapun juga masalah komunikasi. Konflik muncul ketika ada ketidakjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas sampah dan kesalahpahaman antara masyarakat. Solusi yang diterapkan, seperti penggunaan jaring di parit, sistem pengambilan sampah door-to-door dan pendekatan secara komunikasi mulai mengatasi masalah tersebut. Secara keseluruhan, meskipun ada konflik yang timbul, penerapan solusi ini menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan sampah melalui kolaborasi yang lebih terstruktur.

3.2 Proses Kolaboratif

Pada dimensi ini dianalisis lebih dalam melalui beberapa indikator, indikator pertama berkenaan dengan dialog tatap muka dengan temuan Dialog tatap muka memungkinkan pertukaran ide, pandangan, dan informasi secara langsung antar anggota tim. Hal ini membantu memperkuat keterbukaan dan pemahaman di antara para kolaborator mengenai tujuan, tantangan, dan harapan masing-masing. Berdasarkan hal ini, collaborative governance dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar telah melaksanakan pertemuan seperti melaksanakan pertemuan seperti sosialisasi terkait pengelolaan sampah dan kebersihan kota, serta diskusi terbuka antara pihak pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta terkait pengelolaan sampah secara efektif. Dari studi dokumentasi dan hasil wawancara pemerintah Kota Makassar telah mengadakan program yang melibatkan seluruh pihak dalam proses pengelolaan sampah sehingga peneliti menilai bahwa indikator dialog tatap muka pada collaborative governance dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar telah terlaksana.

Pada indikator kedua berkaitan dengan membangun kepercayaan terlihat bahwa Hasil wawancara dan studi dokumentasi di atas menunjukkan sudah adanya upaya pemerintah untuk penanganan tantangan dalam membangun kepercayaan dengan memberikan retribusi sampah gratis kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem tetapi program itu menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Proses dalam membangun kepercayaan ini juga merupakan proses jangka panjang serta membutuhkan adanya komitmen yang dilakukan setiap pemangku kepentingan. Sehingga penulis memahami bahwa indikator membangun kepercayaan dinilai belum berjalan dengan baik.

Pada indikator ketiga terkait dengan komitmen menunjukkan bahwa Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar merupakan proses kolaborasi kegiatan jangka panjang yang berkesinambungan, oleh sebab itu perlu adanya dedikasi dan tanggungjawab para pemangku kepentingan agar tetap mendukung serta memihak pada tujuan yang telah ditentukan. Hasil dari wawancara di atas pemerintah sudah menunjukkan adanya upaya dalam meningkatkan komitmen dalam proses kolaborasi untuk terus berkolaborasi antara pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Sifat yang dilakukan untuk memastikan setiap fasilitas tersebut mematuhi peraturan dan standar dalam pengelolaan limbah dan komitmen tersebut diperkuat dengan adanya motivator di sebar setiap kecamatan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memastikan program terlaksana. Sehingga peneliti menilai bahwa indikator komitmen telah berjalan dengan baik.

Indikator keempat berkenaan dengan saling memahami dengan temuan Kolaborasi yang baik sangat memerlukan adanya peran pemangku kepentingan yang saling memahami dalam proses kolaborasinya terkait maksud dan tujuan kolaborasi serta peran dari masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat. Peran dari masing-masing unsur pemangku kepentingan dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan studi dokumentasi serta hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis memahami bahwa indikator saling memahami antar pemangku kepentingan dengan adanya pembagian peran masing-masing pemangku kepentingan serta ada kesepahaman terkait maksud dan tujuan dari collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar, sehingga peneliti menilai bahwa indikator saling memahami sudah tercapai.

Indikator terakhir berkenaan dengan hasil sementara dengan temuan Hasil capaian sementara merujuk pada pencapaian yang dicapai selama proses kerja sama sebagai bukti kerja sama yang berhasil. Hal ini kemudian menjadi langkah penting menuju mencapai tujuan akhir karena memberikan standar untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas kerja tim di masa mendatang. Berdasarkan Pernyataan wawancara di atas kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah di Kota Makassar dalam menjaga kebersihan mendapatkan hasil yang baik dengan meraih kembali piala adipura. Hasil studi dokumentasi dan wawancara menunjukkan bahwa

Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang mendapatkan kembali gelar adipura telah menunjukkan hasil yang baik, Sehingga pemerintah harus mempertahankan hasil tersebut ataupun meningkatkannya.

Dari penjelasan indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa proses kolaboratif menemukan bahwa terdapat empat indikator berhasil yaitu dialog tatap muka, komitmen, saling memahami dan hasil sementara. Sementara indikator membangun kepercayaan dianggap tidak berhasil karena meskipun proses kolaborasi telah menunjukkan adanya peningkatan dengan mendapatkan kembali gelar adipura namun belum mencapai hasil yang optimal. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa dimensi proses kolaboratif telah berjalan meskipun belum optimal.

3.3 Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan terbangun atas 3 indikator utama. Pada indikator pertama terkait dengan partisipasi inklusif menunjukkan hasil bahwa Partisipasi inklusif berperan penting untuk memastikan bahwa keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam kolaborasi berjalan dengan efektif. Desain kelembagaan yang inklusif memastikan bahwa forum tersebut dapat mencakup partisipasi semua aktor dari setiap perangkat daerah dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan yang disampaikan kepala pengelola bank sampah partisipasi inklusif pada kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar ditunjukkan dengan adanya partisipasi masyarakat dengan membuat Bank Sampah Unit yang tergabung kedalam forum pengelolaan sampah yakni grup WhatsApp BANK SAMPAH KOTA MAKASSAR. terdapat 280 lebih Bank Sampah Unit yang telah tergabung ke dalam grup WhatsApp BANK SAMPAH KOTA MAKASSAR. Angka ini adalah jumlah yang cukup banyak yang tergabung untuk mengumpulkan, memilah, dan mendaur ulang sampah dari masyarakat, sementara Bank Sampah Pusat menyediakan fasilitas dan dukungan untuk pengelolaan sampah lebih lanjut, seperti daur ulang atau pemanfaatan sampah yang dapat bernilai ekonomi.

Indikator kedua berkenaan dengan aturan dasar dengan temuan bahwa Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sejalan dengan aturan dan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Selanjutnya terbit Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan didukung dengan didukung Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berdasarkan penjelasan informan serta studi dokumentasi yang dilakukan, peneliti memahami bahwa indikator aturan dasar yang jelas sudah tersedia dan telah sesuai dengan konsep Ansell & Gash (2008) yang berkaitan dengan kemampuan suatu peraturan atau kebijakan untuk memberikan panduan yang jelas kepada para aktor yang terlibat.

Pada indikator ketiga berkenaan dengan transparansi dengan temuan Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar dalam hal ini telah menyediakan platform atau portal data yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk memberikan akses yang mudah dan terbuka bagi publik resmi pengelolaan sampah nasional yaitu SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Portal ini tak hanya menyajikan data dan informasi terkait Pemerintahan Kota Makassar secara menarik, melainkan juga pihak-pihak yang berkolaborasi di dalamnya. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan, peneliti memahami bahwa informasi terkait pengelolaan sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Makassar serta prosesnya pada collaborative governance sudah bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak. Sehingga indikator transparansi proses dianggap berjalan dengan baik oleh peneliti yang dibuktikan dengan ketersediaan akses informasi yang terbuka kepada public.

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan terhadap ketiga indikator dalam desain kelembagaan, peneliti memahami bahwa desain kelembagaan pada *collaborative*

governance dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Makassar sudah berhasil diterapkan.

3.4 Kepemimpinan Fasilitatif

Pada dimensi ini dibangun atas 3 indikator utama, dimana indikator pertama berkenaan dengan mediasi, dengan hasil temuan bahwa aktifnya pemerintah khususnya mediasi terhadap konflik yang terjadi untuk setiap pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan secara adil, mencegah dampak lingkungan yang lebih luas, serta memastikan kesadaran dan kepatuhan semua pihak terhadap aturan yang berlaku dengan cara pendekatan mediasi yang baik. peneliti memahami bahwa peran penting pemimpin dalam menyelesaikan konflik dan perbedaan pendapat dengan melakukan pendekatan mediasi dalam kolaborasi sudah terlaksana dengan baik. Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa indikator mediasi dalam proses kolaborasi sudah optimal.

Pada indikator kedua berkenaan dengan fasilitas dialog dengan temuan sebagaimana yang telah peneliti sampaikan sebelumnya bahwa pengelolaan sampah merupakan suatu proses integrasi yang berasal dari setiap pemangku kepentingan berdasarkan tugas dan kepentingan yang telah diatur, sehingga berdasarkan kepemimpinan fasilitatif memberikan kepercayaan, fasilitas untuk setiap pemangku kepentingan diberikan tempat untuk menyampaikan pendapat terkait pengelolaan sampah berkelanjutan. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan menunjukkan bahwa indikator memastikan kolaborasi diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan semua pemangku kepentingan sudah dijalankan dengan baik ditunjukkan dengan adanya forum yang dilakukan pemangku kepentingan untuk menentukan target yang ingin dicapai. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti memahami bahwa peran pemangku kepentingan dalam menyediakan fasilitas berbicara sudah dilaksanakan dengan teratur dan baik dengan mengadakan forum terkait pengelolaan sampah setiap tahunnya.

Pada indikator pemberdayaan menghasilkan temuan bahwa kepemimpinan yang bersifat fasilitatif memberikan kepercayaan dan otoritas kepada setiap perangkat daerah untuk menentukan target serta jumlah sampah yang akan dikelola dan diolah. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pemberdayaan pihak-pihak dalam pengelolaan sampah telah berjalan dengan baik, ditandai dengan edukasi yang intensif, pembentukan kelompok pengelola sampah, dan pemberian insentif ekonomi. Kolaborasi dengan pemerintah, LSM, dan akademisi juga mendukung kelancaran program. Pihak-pihak yang terlibat diberikan kebebasan untuk menentukan langkah yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan sampah.

Kesimpulan dari pemaparan hasil pembahasan terhadap tiga indikator collaborative governance pada dimensi kepemimpinan fasilitatif peneliti menemukan bahwa semua indikator sudah terlaksana yakni indikator memastikan kolaborasi mendukung keberlanjutan pengelolaan lingkungan di Kota Makassar. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa dimensi kepemimpinan fasilitatif sudah optimal

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama berkenaan dengan aspek kondisi awal dalam collaborative governance pengelolaan sampah di Kota Makassar menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam hal sumber daya dan pengetahuan. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mengindikasikan peningkatan volume sampah sebesar 7-8% setiap tahunnya, dengan produksi sampah harian mencapai

sekitar 1.200 ton pada tahun 2022. Tantangan ini diperparah oleh rendahnya tingkat pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, dengan hanya sekitar 15% rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah secara konsisten. Meskipun pemerintah kota telah menginisiasi program insentif tahunan senilai 5 juta rupiah untuk 25 pelaku terpilih dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, cakupan program ini masih terbatas. Dari total 153 kelurahan di Makassar, hanya sekitar 30 kelurahan yang telah terlibat aktif dalam program ini, menunjukkan bahwa insentif belum menjangkau seluruh pemangku kepentingan dalam kolaborasi pengelolaan sampah. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan implementasi di lapangan, serta menunjukkan perlunya strategi yang lebih komprehensif dan inklusif dalam membangun collaborative governance yang efektif. Tantangan-tantangan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas, peningkatan kesadaran masyarakat, dan perluasan jangkauan program insentif untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar. Hasil ini sama halnya dengan penelitian di DKI Jakarta dimana kondisi awal kolaborasi menemui masalah pada keterbatasan sumber daya (Avitadira et al., 2023)

Temuan utama berkenaan dengan aspek Proses Kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar menunjukkan hasil yang bervariasi. Dari lima indikator yang dievaluasi, empat indikator berhasil diimplementasikan dengan baik, mencakup dialog tatap muka, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil antara. Keberhasilan ini tercermin dari perolehan penghargaan Adipura oleh Kota Makassar selama tiga tahun berturut-turut (2019-2021), yang mengindikasikan adanya kemajuan signifikan dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan kota. Namun, indikator kelima, yaitu membangun kepercayaan, masih menghadapi tantangan besar. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara prestasi yang dicapai oleh pemerintah dan persepsi masyarakat. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya kepercayaan ini meliputi kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran penanganan sampah, yang mencapai Rp 350 miliar pada tahun 2022, serta ketidakmerataan layanan pengangkutan sampah, di mana hanya 80% dari total 153 kelurahan yang terlayani secara optimal. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun collaborative governance telah menghasilkan beberapa capaian positif, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan di Kalimantan utara dimana hasilnya merata dengan temuan proses kolaborasi masih belum berjalan dengan baik (Harmana et al., 2021)

Temuan terakhir yang dianggap penting dalam penelitian ini berkenaan dengan aspek Desain Kelembagaan (Institutional Design) dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek ini telah berhasil diimplementasikan dengan baik, menciptakan fondasi yang kuat untuk collaborative governance. Keberhasilan ini ditandai oleh tiga elemen kunci: Pertama, tersedianya forum komunikasi yang efektif, seperti Forum Kota Sehat dan Forum Kampung Bersih, yang memfasilitasi dialog reguler antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kedua, adanya peraturan dasar yang jelas, yang dimanifestasikan melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilahan Sampah. Ketiga, transparansi proses yang ditunjukkan melalui sistem pelaporan terbuka dan akses publik terhadap informasi pengelolaan sampah melalui website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Kombinasi ketiga elemen ini telah berhasil menciptakan partisipasi inklusif dalam pengelolaan sampah, yang terlihat dari meningkatnya jumlah bank sampah dari 43 unit pada tahun 2014 menjadi 446 unit pada tahun 2022, serta terbentuknya 153 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang aktif dalam pengelolaan sampah di tingkat kelurahan. Desain kelembagaan yang inklusif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program pengelolaan sampah, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap inisiatif lingkungan, yang tercermin dari penurunan volume sampah yang dibuang ke TPA sebesar 12% antara tahun 2020 dan 2022. Keberhasilan aspek Desain Kelembagaan ini menjadi bukti nyata bahwa pendekatan

collaborative governance mampu menciptakan struktur dan mekanisme yang mendukung partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar. Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana desain kelembagaan di desa Kramatwatu masih belum terbentuk sempurna meskipun pelaksanaan bank sampah berjalan baik (Lestari & Farahnisa, 2020).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Collaborative governance Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menyatakan bahwa proses kolaborasi sebenarnya sudah berjalan namun belum optimal dikarenakan belum tercapainya beberapa indikator yang diteliti.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, ada beberapa alasan yang mengakibatkan penelitian ini tidak sempurna, pertama berkenaan dengan singkatnya waktu penelitian yang hanya 1 bulan, selain itu beberapa informan tidak ditemukan atau belum mencapai informasi yang cukup karena singkatnya waktu penelitian, selain itu keterbatasan anggaran penelitian juga berpengaruh mengingat beberapa biaya dikeluarkan dalam penelitian ini. Terakhir luasnya Kota Makassar menyebabkan beberapa titik tidak mampu dijangkau oleh penulis yang hanya sendiri saat melakukan penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penelitian ini lebih terfokus dalam melihat proses kolaborasi pada waktu itu juga, artinya tidak ada analisis mendalam mengenai dampak jangka Panjang yang akan terjadi dan direncanakan. Oleh karena itu diharapkan penelitian mendatang agar mampu menganalisis dampak jangka Panjang yang ditimbulkan dalam proses kolaborasi penyelesaian masalah sampah ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis memanjatkan puji dan terima kasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Perjalanan akademis yang penuh makna ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang berharga. Penulis menghaturkan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta atas cinta dan bimbingan yang tak terhingga, jajaran pimpinan IPDN dan para dosen yang telah membagikan kekayaan ilmu dan pengalaman, serta secara istimewa kepada Ibu Serly Wulandari yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah membimbing penulis selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat yang telah mewarnai dan membentuk karakter penulis selama ini. Harapan tulus penulis, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan menjadi setitik kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Angel, A., & Nasution, M. A. (2023). Kolaborasi Pemerintah Dengan Stakeholders Dalam Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Belawan Sicanang Kota Medan. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1), 69–76. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3528>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, C. K. (2016). Collaborative Governance as Creative Problem-Solving. *Enhancing Public Innovation by Transforming Public Governance*, 35–53. <https://doi.org/10.1017/cbo9781316105337.002>

- Aragaw, T. A. (2025). Plastic waste management strategies toward zero waste : Status , perspectives and recommendations for Ethiopia. *Cambridge Prisms: Plastics*, 2018(2024). <https://doi.org/10.1017/plc.2024.37>
- Avitadira, K., Indrawati, N., & Kunci, K. (2023). Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah di DKI Jakarta Tahun 2021 : Tinjauan Collaborative Governance. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 49–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.147>
- Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021). Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 4(2), 221–234. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v4i2.179>
- Deneen, P. (2010). A Review of “Investing in Democracy: Engaging Citizens in Collaborative Governance.” *Journal of the American Planning Association*, 76(4), 513–514. <https://doi.org/10.1080/01944363.2010.508379>
- Harmana, D., Wargadinata, E., & Nurdin, I. (2021). Pengelolaan Sampah Berbasis Collaborative Governance Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(2), 247–260. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.430>
- Jumaah, S. H., Dewi, D. C., Kartini, F., & Benita, N. (2022). Collaborative Governance Berbasis Pendekatan Penta Helix Stakeholder Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Lombok Timur. *TheJournalish: Social and Government*, 3(2), 130–138. <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.264>
- Kereh, B. K., Effendy, K., Suprajogo, T., & Ernawati, D. P. (2024). Transformasi pengelolaan sampah di kota manado provinsi sulawesi utara. *Jurnal Kajian Riset Multidisiplin*, 8(5), 127–148. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jkrm/article/view/2793/2805>
- Kurniawan, D. A., & Santoso, A. Z. (2020). Pengelolaan Sampah di daerah Sepatan Kabupaten Tangerang. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31–36. <https://doi.org/10.34306/adimas.v1i1.247>
- Lestari, R. M., & Farahnisa, T. (2020). Collaborative Governance Antara Pemerintah Desa dengan Warga Desa dalam Pengelolaan Cerobong Sampah dan Bank Sampah di Desa Kramatwatu. *Ijd-Demos*, 2(3), 225–239. <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i3.57>
- Mokodompis, Y., Kaunang, M., & Kasenda, V. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23860>
- Nugraha, R. T., Komara, W. Y., Krisna, P. A. N., Puspita, O. R., Muslich, M., Mardhiah, U., & Marthy, W. (2024). Evaluating the effectiveness of protected area management in Indonesia. *Oryx*, 58(4), 474–484. <https://doi.org/10.1017/S003060532300145X>
- Rinaldoa, E., & Rahayu, A. Y. S. (2019). Penanganan Sampah Secara Kolaboratif antara Masyarakat dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Collaborative Waste Management between the Community and Public Facility Maintenance Officers (PPSU) (Cases of Waste Management in Jembatan Lima. *Jurnal Inspirasi* |, 10(1), 1–13. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/penanganan-sampah-secara-kolaboratif-antara-masyarakat-dan-petuga>
- Rochmansjah, H. (2018). Peran Inovasi Kolaboratif dalam Menjawab Tantangan Kebijakan Publik. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 187–200. <http://eprints.ipdn.ac.id/5839/1/PERAN%20INOVASI.pdf>
- Rosyadi, S., & Lestianingrum, E. (2013). Permodelan Sampah Permukiman Berbasis Manajemen kolaborasi (Studi Kasus di Desa Palimanan Barat Kabupaten Cirebon). *Jurnal Pembangunan Pedesaan*. <https://media.neliti.com/media/publications/115964-ID-permodelan-sampah-pemukiman-berbasis-man.pdf>
- Rucevska, I., Tsakona, M. C., & Wermter, B. (2024). Sustainability of plastic waste

- management through voluntary initiatives: A case study in Indonesia. *Cambridge Prisms: Plastics*, 2(18), 1–9. <https://doi.org/10.1017/plc.2024.33>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Alfabeta Publication*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Suryanto, A., Nurdin, N., Andriansyah, Rahayu, N. S., & Irawati, E. (2023). Predicting supply chain management of e-waste recycling behavior using an extended theory of planned behavior model. *Uncertain Supply Chain Management*, 11(3), 1001–1008. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.4.022>

